



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.**

Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp4.028.229.700.959,00 (empat triliun dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Pengundang-undangan,

Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
I	Instalasi Pembangkit Listrik		
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias	2006	Rp78.118.831.250,00
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara - Kepulauan Nias, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias	2006	Rp5.314.126.225,00
3.	PLTA Wonorejo/Ampel Gading yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan	1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005,	Rp185.860.704.222,00

Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2006, 2007, dan 2008	
4.	PLTG Peaking 2 x (50-60) MW yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja UIPKITRING Kalimantan)	2012 dan 2013	Rp905.478.955.827,00
5.	PLTM Budong-Budong yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua)	2008, 2009, dan 2010	Rp37.174.993.199,00
Sub Jumlah Instalasi Pembangkit Listrik (I)			Rp1.211.947.610.723,00
II	Instalasi Gardu Listrik Induk		
1.	Gardu Listrik yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias	2006, 2007, dan 2008	Rp21.162.025.817,00
2.	Gardu Induk 150kV Meulaboh & PLTU Meulaboh (Ext) yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011, 2012, dan 2013	Rp35.715.161.086,00
3	Gardu Induk 150 kV Rantau Prapat yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan	2007	Rp2.586.728.000,00

Satuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)		
4.	Gardu Induk 150 kV Padang Sidempuan (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2009 dan 2010	Rp8.922.660.000,00
5.	Gardu Induk 150 kV Tanjung Morawa (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2009 dan 2010	Rp21.768.486.000,00
6.	Gardu Induk 150 kV Kualanamu yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2009, 2010, dan 2011	Rp45.369.781.000,00
7.	Gardu Induk 150kV Pasir Putih dan Garuda Sakti (Ext) yang berlokasi di Provinsi Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011, 2012, dan 2013	Rp58.978.768.340,00

8. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
8.	Gardu Induk 150 kV Air Raja yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011, 2012, dan 2013	Rp37.885.368.024,00
9.	Gardu Induk 150 kV Kijang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011, 2012, dan 2013	Rp20.397.316.307,00
10.	Gardu Induk 150 kV Sri Bintang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011, 2012, dan 2013	Rp21.166.503.065,00
11.	Gardu Induk 150 kV Tanjung Uban yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011, 2012, dan 2013	Rp24.356.658.813,00
12.	Gardu Induk 150 kV Bungus yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Bagian Selatan)	2007 dan 2008	Rp 9.795.757.000,00

13. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
13.	Gardu Induk 150 kV Muara Sabak New yang berlokasi di Provinsi Jambi, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (UIP RING Sumatera II)	2011, 2012, dan 2013	Rp35.748.000.396,00
14.	Gardu Induk 150 kV Tanjung Api-Api yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Bagian Selatan)	2010, 2011, dan 2012	Rp40.066.665.595,00
15.	Gardu Induk 150 kV Kelapa yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, dan 2013	Rp26.334.511.966,00
16.	Gardu Induk 150 kV Koba yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, dan 2013	Rp24.548.420.672,00
17.	Gardu Induk 150 kV Pangkal Pinang yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, dan 2013	Rp23.179.313.150,00

18. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
18.	Gardu Induk 500 kV Balaraja dan Gardu Induk 150 kV Balaraja Ext. yang berlokasi di Provinsi Banten, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2007 dan 2008	Rp28.315.883.360,00
19.	Gardu Induk 150 kV Bumi Semarang Baru yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	2005	Rp33.189.198.700,00
20.	Gardu Induk 150 kV Mranggen yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	2005	Rp29.291.976.000,00
21.	Gardu Induk 150 kV Purbalingga yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	2005	Rp30.152.641.200,00
22.	Gardu Induk Tegangan Eksira Tinggi 500 kV Ngimbang/New Babat yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009	Rp331.743.172.519,00
23.	Gardu Induk 150 kV Sambas yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, hasil kegiatan	2011, 2012, dan 2013	Rp16.864.901.005,00

Eks. . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Eks. Satuan Kerja UIPKITRING Kalimantan		
24.	Gardu Induk 150 kV Amuntai yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Kalimantan)	2007	Rp25.690.341.000,00
25.	Gardu Induk 150 kV Batu Licin yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Kalimantan)	2009, 2010, dan 2011	Rp56.517.862.000,00
26.	Gardu Induk 150 kV Paniki (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011 dan 2012	Rp18.426.478.091,00
27.	Gardu Induk 150 kV Silae (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011 dan 2012	Rp12.815.342.348,00
28.	Gardu Induk 150 kV Sinjai yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks.	2005 dan 2006	Rp1.117.570.259,00

Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA)		
29.	Gardu Induk 150 kV Tanjung Bunga yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA)	2007	Rp8.793.705.800,00
30.	Gardu Induk 150 kV Bontoala yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA)	2007	Rp11.606.494.900,00
31.	GIS Hybrid 150 kV Bontoala yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua (PIKITRING SULMAPA)	2007	Rp19.676.211.500,00
Sub Jumlah Instalasi Gardu Listrik Induk (II)			Rp1.082.183.903.913,00
III	Instalasi Gardu Distribusi		
1.	Instalasi Gardu Distribusi yang berlokasi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara	2015	Rp1.753.642.914,00

2. Instalasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
2.	Instalasi Gardu Distribusi yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara	2015	Rp9.477.291.000,00
Sub Jumlah Instalasi Gardu Distribusi (III)			Rp11.230.933.914,00
IV	Instalasi Jaringan Transmisi		
1.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU Labuhan Angin - GI Sibolga (sebagian) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2006	Rp308.537.683,00
2.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV GI Tanjung Morowa - GI Kualanamu yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2009, 2010, dan 2011	Rp28.367.614.000,00
3.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Bagan Batu - Duri yang berlokasi di Provinsi Riau, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau	2007	Rp887.865.000,00
4.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU Riau/Tenayan - Pasir Putih yang berlokasi di Provinsi Riau, hasil Satuan Kerja	2011, 2012, dan 2013	Rp9.699.950.418,00

Unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)		
5.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Air Raja - Kijang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011 dan 2013	Rp8.750.831.034,00
6.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Air Raja - Sri Bintang (Section 1 & 2) yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011 dan 2013	Rp11.026.577.754,00
7.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Air Sri Bintang - Tanjung Uban (Section 1 & 2) yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	2011, 2012, dan 2013	Rp18.574.552.665,00
8.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Phi. Connection Muara Sabak yang berlokasi tersebar di Provinsi Jambi, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja UIP RING Sumatera II)	2011, 2012, dan 2013	Rp50.697.837.444,00

9. Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
9.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Phi. Incomer Tanjung Api - Api yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Sumatera Bagian Selatan)	2010, 2011, dan 2012	Rp120.470.039.024,00
10.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 3 (Banten) - Tx. - Teluk Naga & Tx. New Tangerang yang berlokasi di Provinsi Banten, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2007, 2008, dan 2009	Rp89.695.202.300,00
11.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Tasik - Depok & Pedan - Tasik yang berlokasi di Provinsi DI Yogyakarta, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	2006	Rp117.939.177.033,00
12.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Babat - Ngimbang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2003	Rp12.566.340.000,00
13.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Ngimbang - Mliwang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2003	Rp43.110.092.000,00

14. Saluran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
14.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Babat - Ngimbang - Mliwang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2004	Rp60.841.781.000,00
15.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Ngimbang Incomer & Babat - Ngimbang - Mliwang yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2007, 2008, dan 2009	Rp48.237.505.800,00
16.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 3 Jatim (Tanjung Awar - Awar) - Tuban yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan JBTB I (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2007, 2008, dan 2009	Rp73.384.930.301,00
17.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 1 Jatim (Pacitan) - Tx. Pacitan & Tx. Wonogiri yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan VII (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2007, 2008, dan 2009	Rp360.898.980.600,00
18.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Sengkol - Paokmotong - Pringgabaya, Sengkol - Kuta yang berlokasi di Provinsi Nusa	2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013	Rp96.270.417.315,00

Tenggara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Tenggara Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)		
19.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kV Bolok - Maulafa - Naibonat - Nonohanis yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013	Rp126.464.292.349,00
20.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Mantang Incomer yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2011, 2012, dan 2013	Rp15.060.230.748,00
21.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Telling - Paniki yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Eks. Satuan Kerja IKITRING Sulawesi, Maluku dan Papua	2012	Rp 3.844.428.140,00
Sub Jumlah Instalasi Jaringan Transmisi (IV)			Rp1.297.097.182.608,00
V	Instalasi Jaringan Distribusi		
A	Jaringan Listrik		
1.	Jaringan Listrik yang berlokasi di Provinsi Aceh, hasil kegiatan	2006, 2007, 2008, dan	Rp329.886.759.636,00

Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias	2009	
2.	Jaringan Listrik yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara - Kepulauan Nias, hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh - Nias	2005, 2006, dan 2007	Rp32.384.114.637,00
Sub Jumlah Jaringan Listrik (V A)			Rp362.270.874.273,00
B	Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM)		
1.	Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM) yang berlokasi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara	2015	Rp11.995.397.928,00
2.	Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM) yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara	2015	Rp41.408.067.000,00
Sub Jumlah Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (JTM) (V B)			Rp53.403.464.928,00
C	Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR)		
1.	Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) yang berlokasi tersebar di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara	2015	Rp3.272.588.600,00

2. Instalasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
2.	Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) yang berlokasi tersebar di Provinsi Maluku Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Maluku Utara	2015	Rp6.823.142.000,00
Sub Jumlah Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) (V C)			Rp10.095.730.600,00
Jumlah Instalasi Jaringan Listrik (V)			Rp425.770.069.801,00
Jumlah			Rp4.028.229.700.959,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

